

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 15 Februari 2017 Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah serentak. Para calon kepala daerah sebagai peserta pesta demokrasi banyak melakukan berbagai cara untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan untuk dapat mengemban amanah sebagai kepala daerah periode 2017 sampai dengan 2022. Salah satu cara untuk mendapat suara tertinggi adalah dengan cara menggandeng partai-partai politik. Banyak strategi yang dilakukan partai politik sebagai pendukung dari setiap pasangan calon yang mampu memberikan pengaruh besar dalam memperoleh suara tinggi dari masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam pemilihan umum kepala daerah diharapkan mampu menciptakan politik yang demokratis dan mampu mewujudkan kedaulatan masyarakat.

Untuk mewujudkan harapan tersebut dalam pemilihan umum maka partai politik memiliki peran penting sebagai alat yang dapat menggerakkan dan menjalankan roda politik. Partai politik yaitu suatu kelompok yang telah terorganisir yang memiliki visi dan misi, dan setiap anggotanya mempunyai orientasi yang jelas terhadap nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dan dapat menduduki politik dengan cara yang diatur secara konstitusional agar dapat melaksanakan kebijakan—

kebijakan yang telah mereka buat dalam sistem politik mereka (Nugroho, 2017).

Sebagai penggerak roda politik, partai politik di Indonesia terus bermunculan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum. Banyak partai baru yang mampu bersaing dengan partai-partai besar yang telah terlebih dahulu didirikan. Partai-partai politik di Indonesia khususnya Partai besar seperti Partai Golkar tetap mampu mempertahankan eksistensinya walaupun pernah mengalami tekanan pada masanya. Partai golkar dari masa ke masa terus mengalami perubahan baik ditingkat nasional maupun daerah. Banyak hal yang telah terjadi pada Partai Golkar dan menjadikan Partai Golkar terus berinovasi guna mendapatkan posisi yang berpengaruh besar ditengah masyarakat Indonesia.

Selama era reformasi, dalam kurun waktu 1998-2004 merupakan masa yang paling berat dalam sejarah kehidupan Partai Golkar. Partai Golkar mendapat tekanan terus menerus dari berbagai pihak berupa pembentukan opini negatif yang merugikan. Di berbagai tempat terjadi aksi dan demonstrasi anti Partai Golkar yang disertai ancaman fisik dan teror terhadap kader, pengurus, dan pimpinan partai. Bahkan Partai Golkar mengalami pula pengrusakan sarana fisik seperti fasilitas kantor partai, hingga ancaman pembubaran melalui pengadilan dan Dekrit Presiden (Sani, 2011).

Partai Golkar terus berusaha untuk membangun kehidupan politik yang lebih demokratis untuk keluar dari ancaman pembubaran dengan

menciptakan paradigma baru. Paradigma baru Partai Golkar ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai Golkar. Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu (diakses dari partaigolkar.or.id).

Partai Golkar terus aktif dalam melakukan sosialisasi dilingkungan masyarakat dan juga berusaha untuk mempertahankan eksistensinya ditengah ancaman-ancaman yang terjadi. Menurut Abidin (2016) banyak hal yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam merebut kembali simpati masyarakat. Kebesaran nama dan pengalaman yang ditorehnya selama ini menjadi salah satu alasan Partai Golkar dapat bertahan hingga saat ini. Partai Golkar sebagai partai yang cukup berpengalaman dalam berbagai suksesi pemilihan kepala daerah selalu menepatkan calon yang diusung melalui mekanisme yang begitu lama dan sangat hati-hati. Perdebatan yang

cukup alot dalam internal partai menjadi indikator batapa calon yang diusung tersebut telah melalui berbagai macam tahapan dari ketokohan, kreadibilitas, sampai dengan malakukan survey demi melihat seberapa banyak peluang dan nilai jual dari calon yang diusung tersebut.

Menurut Sani (2011) Munas VII Partai Golkar pada Desember 2004 merupakan tonggak sejarah yang dapat membawa Partai Golkar untuk kurun waktu lima tahun (2004-2009) menjadi periode kebangkitan. Untuk itu Partai Golkar harus mampu tampil dengan strategi baru untuk menjawab perubahan dan tantangan tersebut sehingga menjadi partai politik unggulan dan terdepan, yang menjadi kekuatan utama dan pilar utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2004 terjadi pemulihan Partai Golkar sehingga mampu menjadi pemenang pada pemilu legislatif secara nasional. Dengan kekuatan di lembaga legislatif yang dimiliki oleh Partai Golkar saat ini, diharapkan menjadi modal utama bagi Partai Golkar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Dalam pemilihan umum khususnya di Kabupaten Tebo dari dua kali pemilihan umum langsung yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2011 dan pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tebo, selalu memenangkan partai yang sama yaitu Partai Golkar. Pemilih sepertinya tidak terganggu dengan isu-isu negatif ataupun naik dan banyaknya pemilih partai Demokrat (2009) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2014) yang pada tahun-tahun tersebut memenangkan pemilu legislatif secara nasional. Kuatnya dukungan terhadap partai Golkar di Kabupaten Tebo juga

terbukti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimenangkan dua periode oleh calon yang sama dan didukung oleh Golkar sebagai mesin politiknya.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo periode 2017-2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu adalah bagian dari wujud demokrasi untuk semua elemen masyarakat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo tersebut diikuti oleh dua pasangan calon masing-masing pasangan Nomor 1, atas nama Hamdi, S.Sos, MM dan H. Harmain, S.E., M.M merupakan calon yang diusung oleh Partai Demokrat dan didukung oleh Nasdem,PKB, PPP serta PBB. Pasangan Nomor 2 atas nama H. Sukandar, S,Kom.,M.Si dan Syahlan.S.H yang diusung oleh Partai Golkar dan didukung oleh PDIP, PAN, Hanura serta PKS.

Terpilihnya H. Sukandar, S,Kom.,M.Si dan Syahlan.S.H. sebagai pasangan calon yang diusung oleh partai Golkar dalam pilkada di Kabupaten Tebo tahun 2017 merupakan jawaban dari eksistensi Partai Golkar yang belum pudar di tingkat daerah . Tentu Partai Golkar mempunyai alasan sendiri mengapa H. Sukandar, S,Kom.,M.Si dan Syahlan.S.H.menjadi calon kuat yang diusung dalam pilkada di Kabupaten Tebo tahun 2017. Ketokohan dan kredibilitas keduanya telah teruji dalam sejarah Partai Golkar khususnya di Kabupaten Tebo, apalagi seorang H. Sukandar, S,Kom.,M.Si telah lama berkecimpung dalam rana politik di Kabupaten Tebo, dimana H. Sukandar sebelum terpilih menjadi Bupati

tahun 2017, beliau telah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tebo periode 2006-2011 dan menjadi Bupati terpilih di Kabupaten Tebo periode 2011-2016 yang juga disung oleh Partai Golkar. Pengalaman dan dedikasinya sehingga menjadikan beliau layak untuk menjadi calon Bupati yang diusung oleh Partai Golkar.

Tabel 1.1 Hasil Pilkada Kabupaten Tebo Tahun 2017

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Presentase (%)
1. Hamdi, S.Sos, MM dan H. Harmain, S.E., M.M	Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB, PPP serta PBB	73.263 Suara	44,61%
2. H. Sukandar, S.Kom.,M.Si dan Syahlan, S.H.	Partai Golkar, PDIP, PAN, Partai Hanura serta PKS	90.964 Suara	55,39%

Sumber: KPUD Kabupaten Tebo Tahun 2017

Dalam upaya kemenangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diperlukan tidak hanya dukungan partai namun juga strategi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Strategi merupakan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat (Bayu, 2016). Disaat Partai Golkar dihujat oleh masyarakat mulai dari

kejatuhan Presiden Soeharto sampai dengan kasus ketua umum dari waktu ke waktu, Partai Golkar ternyata tetap mampu menang diberbagai daerah termasuk dalam pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Tebo.

Oleh karena itu penulis ingin menyusun skripsi dan melakukan penelitian dengan judul **Strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2017.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Partai Golkar dalam pemenanga pemilukada tahun 2017 di Kabupaten Tebo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pemilukada tahun 2017 di Kabupaten Tebo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang strategi Partai Golkar dalam pilkada tahun 2017 yang lalu di Kabupaten Tebo.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang cara Partai Golkar mengantisipasi kelemahan dalam menghadapi lawan-lawan politik dalam pilkada tahun 2017 yang lalu di Kabupaten Tebo

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi untuk Pilkada berikutnya yang ingin mengetahui strategi Partai Golkar dalam memenangkan Paslon yang diusungnya di Kabupaten Tebo.
- b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

Gluec (dalam Saputra, 2010) menyatakan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Bryson secara sederhana mendefinisikan strategi sebagai “*a plan to achieve mission and meet the mandates*” atau suara untuk memilih misi dan melaksanakan mandat. Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun

pengalokasian sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa yang dikerjakan dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan organisasi yang dihadapi (Sani, 2011).

Menurut Peter Schroeder (dalam Anto, 2016) hingga awal masa industrialisasi, istilah strategi masih dipakai sebatas konotasi militer saja. Baru setelah itu kepemimpinan atas sejumlah besar orang diperlukan pula di bidang ekonomi. Sejak saat itu sedikit demi sedikit konsep strategi makin meluas ke berbagai aspek masyarakat, termasuk tentu saja ke bidang politik. Politik juga bertujuan memimpin kelompok-kelompok besar masyarakat atau anggota partai politik dan organisasi ke arah sasaran khusus.

Menurut Arifin (dalam Abidin, 2016) Strategi adalah pendekatan keseluruhan untuk suatu program atau kampanye. Kampanye memerlukan manajemen kampanye yang rapi dan strategikampamnye yang jitu, sehingga dapat dikembangkan suatukonsep kampanye yang vital. Hal ini dimuali dengan perumusan gagasan vital dengn tema kampanye yang persuasif yang kemudian disusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Firmanzah (dalam Saputra, 2010) guna mencapai tujuan jangka panjang dan antara, partai politik membutuhkan strategi yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah. Strategi partai dapat dibedakan dapat dibedakan dalam beberapa hal:

- a. Strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik ataupun kandidat yang diusungnya. Melalui pemenangan suara, suatu partai politik ataupun kandidatnya akan dapat mengarahkan kebijakan politik di negara bersangkutan agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita, sehingga bentuk dan struktur masyarakat ideal yang diinginkan akan dapat diwujudkan. Menurut Firmanzah (dalam Saputra, 2010) untuk dapat menerapkan strategi ini dibutuhkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Citra Partai

Tugas berat bagi sebuah partai politik salah satunya adalah bagaimana partai politik tersebut dapat diterima oleh masyarakat. permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat krusial, hal ini dikarenakan merupakan langkah awal partai yang harus dilalui untuk mencari solusi bagaimana partai dapat menanamkan citranya di benas masyarakat sebagai organisasi politik yang berkualitas.

Untuk membentuk citra ini bukanlah hal yang sederhana dan mudah. Melaksanakan publikasi dan sosialisasi nilai-nilai partai memerlukan penanganan yang khusus mengingat partai politik mempunyai dinamika yang tidak mudah diduga. Oleh karena itu, public relations dalam kepartaiannya keberadaannya sangat teramat penting dan strategis (Triyono, 2010).

Menurut Ritzer dan Goodman (dalam Fadly, 2017) berpendapat bahwa strategi ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk citra diri dari suatu partai politik sesuai dengan visi, misi dan target pemilih. Citra partai yang dibentuk diupayakan untuk meningkatkan elektabilitas partai dan juga untuk meningkatkan popularitas partai. Meningkatkan citra partai dilakukan dengan berbagai cara, seperti kunjungan langsung terprogram, kampanye *door to door*, aksi sosial insidental, turamen, dan melalui program-program kegiatan lainnya.

2) Kampanye Politik

Menurut Nugroho (2017) berpendapat bahwa secara umum pengertian kampanye adalah suatu proses komunikasi yang memiliki tujuan mengenalkan atau mempublikasikan, mempromosikan kepada masyarakat. Dalam kampanye terdapat informasi atau pesan yang

biasanya menitikberatkan pada keunggulan suatu jasa atau produk yang bersifat persuasif. Tanpa adanya proses kampanye dalam sebuah politik akan membuat partai politik atau seorang tokoh politik sulit dikenal oleh masyarakat secara luas.

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dalam hal ini adalah kegiatan berupa parade, orasi politik, pengumpulan massa, pengiklanan partai dan pemasangan atribut partai seperti umbul-umbul, poster serta spanduk. Panitia telah menentukan periode waktu kampanye tersebut. Selama masa periode kampanye ini setiap peserta diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan resmi. Jika melanggar atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan maka peserta yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Kegiatan kampanye ini diakhiri dengan pemungutan suara yang menentukan siapa yang memperoleh banyak dukungan dan kemudian disahkan sebagai pemenang pemilu (Saputra, 2010).

Kampanye politik yang dilaksanakan harus memiliki strategi kampanye yang baik dengan tujuan yang pasti. Oleh karena itu, harus dipastikan proses kampanye dalam melakukan komunikasi politik memberikan efek yang maksimal dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan

aturan yang ada. Hal tersebut penting agar kampanye politik berjalan sesuai dengan harapan, maka dalam kampanye politik membutuhkan iklan politik yang dilaksanakan tim pemenang untuk memperkenalkan para calon tokoh politik agar lebih dikenal oleh khalayak (Nugroho, 2017).

3) Penggunaan Media

Suatu sistem politik dengan berbagai bentuk dan sifatnya, tetap menempatkan media sebagai sarana komunikasi sebagai hal yang sangat penting. Media yang digunakan dalam komunikasi politik menjadi pusat perhatian para elit politik ataupun penguasa sebagai alat untuk legitimasi rakyat dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan para elit politik ataupun penguasa melalui pesan-pesan yang diinterpretasikan kedalam simbol-simbol kekuasaan (Anwar, 2015).

Media massa merupakan salah satu media yang sering digunakan oleh para penguasa dan elit politik. Media massa adalah sarana persuasi bagi setiap pasangan calon peserta pemilu yang dianggap efektif dan efisien, karena media massa dapat menjangkau banyak target yaitu pemilih dengan waktu yang lebih cepat dan singkat. Untuk

mendatangi secara langsung atau *door to door* semua target pemilih merupakan suatu ketidakmungkinan bagi tim sukses mengingat waktu yang dibutuhkan begitu banyak dan tentu juga akan membuat tenaga dan energi terkuras banyak. Oleh karenanya, penggunaan media massa baik cetak ataupun elektronik merupakan solusi tepat yang sangat memungkinkan bagi tim pelaksana kampanye untuk dapat menjangkau target pemilih secara luas yang tersebar di berbagai titik area (Fadly, 2017).

- b. Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak berkoalisi itu konsisten dengan ideologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis, yaitu memenangkan pemilu, pemilihan partai yang diajak berkoalisi perlu mempertimbangkan image yang akan ditangkap oleh masyarakat luas. Dalam melaksanakan strategi ini membutuhkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Komunikasi Politik

Menurut Maswadi Rauf (dalam Jamil, 2016) berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi dari tujuh fungsi yang dilaksanakan oleh setiap sistem politik. Almond dalam buku *the politics of the development areas* pada tahun 1960 memberikan pendapat

bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam setiap sistem politik yang selalu ada sehingga memungkinkan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan beberapa sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Komunikasi politik memiliki fungsi budaya politik dan sosialisasi politik, sehingga komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari sosialisasi politik dan budaya politik yang merupakan bagian penting dari komunikasi politik itu sendiri. Dalam analisis sistem politik, struktur-struktur yang menjalankan fungsi politik dan bagaimana komunikasi yang dijalankan menjadi sebuah perhatian tersendiri (Muchtari, 2013).

Strategi komunikasi adalah perpaduan antara manajemen komunikasi dan perencanaan komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan. Secara praktis strategi komunikasi ini harus dilakukan dan harus mampu menunjukkan operasionalnya. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan situasi (Jamil, 2016).

Strategi komunikasi politik dalam konteks pilkada dalam rangka meraih kemenangan memiliki peran sentral.

Popularitas seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya menjadi sebuah andalan, akan tetapi ada hal lain yang bisa diaplikasikan sesuai dengan tempat dan kondisi dimana kompetisi dilaksanakan, yaitu strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik akan memberi keuntungan bagi kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, karena dengan menggunakan strategi komunikasi politik yang dipilih secara efektif dapat mempermudah dalam mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan kompetisi dalam pilkada antar pasangan calon.

2) Kinerja Partai

Pencapaian setiap hasil kerja yang dapat dicapai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara ilegal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, maka hal tersebut dapat dikatakan kinerja (Suhery, 2017).

Pada suatu organisasi tingkat kinerja merupakan hal penting yang menjadi perhatian tersendiri. Organisasi yang tingkat kinerja yang dianggap baik adalah apabila

organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bentuk pencapaian visi dan misinya (Avianto, 2011).

Dalam sebuah partai politik, kinerja partai merupakan hal yang sangat penting yang menentukan baik buruknya hasil implementasi visi misi dan program yang telah dilaksanakan. Kinerja partai yang maksimal akan menghasilkan suatu keuntungan dan membentuk loyalitas yang tinggi bagi para anggota atau kader partai itu sendiri. Menurut Efriza (dalam Suhery, 2017) kinerja pada suatu partai politik merupakan sebuah penilaian akhir dari kehadiran partai politik itu sendiri. Dalam hal ini kinerja tentu tidak statis, tetapi dinamis, tergantung bagaimana tingkah laku administrasi atau perilaku organisasi partai politik tersebut dalam kiprah dunia politik.

Amir Ibrahim (dalam Suhery, 2017) juga berpendapat bahwa pada dasarnya kinerja politik adalah bagaimana kemampuan yang sesungguhnya organisasional partai politik itu sendiri dapat mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan baik atau buruk, atau biasa saja dalam arti kata sedang-sedang saja jika dihadapkan dengan kondisi dan situasi tertentu di lingkungan masyarakat.

c. Strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik secara keseluruhan, mulai dari strategi penggalangan dana, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan mekanisme pemilihan anggota serta pemimpin partai, dan sebagainya. Dalam melaksanakan strategi ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1) Memperkuat Institusi Partai

Untuk memperkuat institusi partai dibutuhkan sebuah proses institusionalisasi partai, dimana dalam proses tersebut partai melembagakan dirinya secara menyeluruh. Bangunan partai diatur dan diolah dengan sedemikian rupa hingga dapat menciptakan stabilitas dan pencapaian nilai-nilai tertentu. Bukan hanya internal partai dengan ideologi dan program yang dibangun institusionalisasinya, tetapi institusionalisasi partai juga dilakukan atau dibangun di eksternal partai, yaitu dengan memperkuat tali penghubung partai dengan pemilihnya. Hal ini agar pemilih konsisten atau tetap menjadi pemilih partai tersebut (Hijriah, 2013).

2) Penggalangan Dana

Partai politik memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan, dan untuk menjalankan fungsi tersebut partai politik sangat membutuhkan dukungan biaya yang besar.

Bukan hanya dalam konteks kampanye pemilu biaya besar ini, tetapi juga untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik seperti representasi, pendidikan politik maupun biaya ini sebagai pendukung jalannya roda organisasi (Minan, 2017).

Pada proses pelaksanaan pemilu baik nasional maupun daerah unsur finansial merupakan hal yang akan cukup memberi peluang dalam rangka untuk memenangkan kandidat peserta pemilu. Hal ini dikarenakan unsur finansial dapat dikonversi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kampanye. Terpenuhinya kebutuhan kampanye maka pelaksanaan kampanye dapat dilaksanakan oleh peserta pemilu dengan lebih intens dan masif (Jatmiko, 2014).

3) Pendidikan dan Pelatihan Pengkaderan

Menurut Haryanto (dalam Fadly, 2017) berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kegiatan yang memberikan keterampilan dan kemampuan untuk seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa di setiap sistem politik memiliki prosedur-prosedur yang berfungsi untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun setiap sistem politik

memiliki prosedur - prosedur yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecendrungan bahwa yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan merupakan individu-individu yang berbakat yang memiliki latar belakang yang hampir sama, yaitu mereka yang berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan jika mereka dari kelas bawah tetapi mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan yang memadai.

Didalam partai politik sumber daya manusia sebagai calon anggota atau calon kader akan melalui beberapa proses seleksi yang disebut kaderisasi, yaitu berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan agar memahami arah perjuangan partai, platform partai, sejarah perjuangan partai dan strategi politik yang diperjuangkan oleh partai serta mempunyai militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. Penanaman ideologi adalah salah satu cara yang merupakan faktor kunci (Fadly, 2017).

- d. Partai politik membutuhkan strategi umum untuk bisa terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti peraturan pemerintah, lawan politik, masyarakat, LSM, pers, dan media serta kecenderungan-kecenderungan di level global.

2. Partai Politik

Politik dalam bahasa Arabnya disebut Siyasyah atau dalam bahasa Inggrisnya Politics. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mencapai atau mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik (Syafiie, 2009).

Menurut Carl Friedrich (dalam Syafiie, 2014) partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisasi dengan stabil yang tujuannya merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Nomor 8 tahun 2015).

Partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga ditingkat lokal. Para pemimpin ditingkat pusat dan lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik baik secara sendiri maupun dengan berkoalisi dengan partai lain, dan melakukan kegiatan mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan umum (Surbakti, 2010).

Tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan program-program yang telah meraka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Partai politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional darisuatu bangsa yang sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD republik Indonesia tahun 1945. Tujuan idealnya adalah bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik didirikan bukanlah untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik juga didirikan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan pancasila dan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat didalam Negara Republik Indonesia. Dengan adanya partai politik, kehidupan demokrasi dapat berkembang sehingga kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat tercapai serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Anwar, 2015).

3. Pemilukada

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang berusaha mengembalikan moralitas dan komitmen kerakyatan. Pemilihan Umum Kepala Daerah juga merupakan cara yang tepat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi Modern.

Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik pemilihan gubernur maupun bupati penyelenggaranya ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD masing-masing daerah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang sudah digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD tercantum dalam salah satu ayat yang ada dalam UU No 23 tahun 2014, yang bunyinya:

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasangan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut “Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Harahap, 2017).

Menurut Prihatmoko (dalam Setya, 2016) pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai yang paling sederhana atau paling kecil yaitu kepala desa. Pada konteks lebih luas, pemilihan umum juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan tertentu.

Pemilu merupakan salah satu usaha mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, komunikasi massa, lobbying, dan lain-lain.

Proses pemilihan umum para kandidat melakukan berbagai macam kegiatan untuk sosialisasi untuk memperoleh dukungan seperti melakukan kampanye akbar, door to door sampai penggunaan media seperti T-Shirt, Sticker, Poster, Baliho serta Pemuatan Advertorial di Surat Kabar untuk memperoleh perhatian masyarakat (Tahrir dkk, 2016).

F. Definisi Konsep

Berdasarkan judul penulis yaitu Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilu Kepala Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2017, penulis bagi dalam konsep sebagai berikut:

1. Strategi Partai adalah suatu rencana partai yang memiliki tujuan untuk pengembangan misi partai melalui pelaksanaan yang tepat sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok manusia dengan tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan kepentingan politik sesuai dengan ideologi partai.
3. Pemilu adalah proses pemilihan untuk mendapatkan jabatan politik khususnya jabatan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

G. Definisi Operasional

Untuk melaksanakan penelitian mengenai strategi Partai Golkar, maka diperoleh sejumlah indikator untuk mengidentifikasi variabel. Adapun indikator tersebut merupakan indikator penting diantaranya adalah:

1. Strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa
 - a. Meningkatkan citra partai
 - b. Melakukan kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus
 - c. Media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik
2. Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain
 - a. Membangun komunikasi politik
 - b. Memaksimalkan kinerja partai
3. Strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik
 - a. Memperkuat Institusi Partai.
 - b. Penggalangan Dana.
 - c. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan pengkaderan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis pakai adalah metode penelitian deskriptif yaitu melukiskan keadaan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Menurut Sukmadinata (2007:79-80) metode

adalah cara yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, sedangkan penelitian itu sendiri adalah sarana yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode deskriptif yang merupakan sebuah metode yang efektif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ada berupa fenomena, baik itu fenomena yang merupakan hasil rekayasa maupun fenomena hasil secara alamiah. Pendekatan kualitatif lebih mudah untuk dipahami apabila berhadapan dengan realita yang ada, kemudian bisa lebih mendekatkan peneliti dengan subyek yang diteliti. Selain itu juga lebih peka dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai pola yang dihadapi. Oleh karena itu pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini.

Menurut Salim (2006:34) mengatakan bahwa munculnya penelitian kualitatif disebabkan oleh reaksi atas tradisi yang terkait dengan positivisme dan pasca positivism yang memiliki upaya untuk melakukan kajian budaya dengan karakter yang interpretative. Adanya keberadaan berbagai metode dan pendekatan dalam penelitian kualitatif, dalam menentukan meningkatnya atau tidak perkembangan dan kematangan masing-masing metode ternyata ditentukan juga oleh bidang keilmuan beserta sejarah perkembangannya. Oleh sebab itu, hal tersebut mengakibatkan setiap uraian mengenai penelitian kualitatif harus bekerja di dalam rentang historis yang kompleks. Penelitian kualitatif memiliki makna yang berbeda dalam setiap masing-masing

momen. Walaupun demikian, pengertian umum tetap bisa ditawarkan: penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretative dan wajar terhadap permasalahan yang pokok dalam pengkajiannya. Hal ini berarti bahwa penelitian kualitatif bekerja di dalam setting yang alamiah, dan berusaha untuk mengerti dan memberi tafsiran pada fenomena-fenomen yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini penulis hanya menentukan informan yang mengerti sekali mengenai strategi Partai Golkar dalam kemenangan pemilukada bupati dan wakil bupati tahun 2017 di Kabupaten Tebo , dalam hal ini adalah pimpinan Partai Golkar di Kabupaten Tebo Jambi antara lain yaitu:

- a. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo
- b. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo
- c. Kepala Bidang Pemenang Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis akan memakai cara antara lain:

a. Wawancara

Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Wawancara adalah sebuah dialog yang

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari informan. Pedoman wawancara yang dibuat peneliti tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dilakukan tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan strategi partai Golkar dalam pemenangan pemilukada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tebo tahun 2017.

Tabel 1.2 Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Agus Rubyanto, SE	Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo
2	Subhan Nazari, S.Hi	Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo
3	Kusdianto	Kepala Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen seperti surat-surat, memo-memo organisasi, pengumuman-pengumuman, hasil kerja, hasil uji kompetensi pegawai, arsip-arsip pegawai, arsip organisasi, laporan-laporan pegawai, time table atau

tabel waktu, kebijakan, dan pengaturan. Data hasil dokumentasi diperlukan karena metode dokumentasi mempunyai nilai lebih dalam pengungkapan terhadap sesuatu hal dan kejadian yang telah didokumentasikan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan triangulasi data penelitian.

3. Jenis Data

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari pihak pertama yang bentuknya masih subyektif karena belum diolah dan merupakan pendapat pribadi pihak pertama. Data primer pada penelitian ini adalah jawaban yang dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara mengenai Strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Tabel 1. 3 Data Primer

No	Data	Sumber
1	Strategi Partai Golkar dalam melaksanakan proses pemilukada di Kabupaten Tebo tahun 2017	Wawancara
2	Mekanisme pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tebo tahun 2017	Wawancara
3	Dana yang dikeluarkan selama proses pemilukada di Kabupaten Tebo tahun 2017	Wawancara
4	Hasil pemilukada di Kabupaten Tebo tahun 2017	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bentuknya sudah cenderung lebih obyektif, karena sudah diolah pihak ketiga umumnya dikumpulkan dari data statistik, monografi, jurnal, buku-buku tentang daerah yang diteliti.

Tabel 1.4 Data Sekunder

Nama Data	Sumber
Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pilkada tahun 2017 di Kabupaten Tebo	Dokumen dari KPUD Kabupaten Tebo
Anggaran biaya pemasukan dan pengurangan dalam pemilukada tahun 2017 di Kabupaten Tebo	Dokumen dari DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo
Statistik Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017	Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
Komposisi dan Personalial DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo tahun 2017	Dokumen dari DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kabupaten Tebo, karena penulis ingin mengetahui tentang bagaimana strategi Partai Golkar dalam pemilu pada tahun 2017 yang lalu di Kabupaten Tebo dan bagaimana cara Partai Golkar mengantisipasi kelemahan dalam menghadapi lawan-lawan politik dalam pemilu pada tahun 2017 yang lalu di Kabupaten Tebo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif, dalam teknik analisis data akan ada beberapa aspek penting yang dilakukan diantaranya adalah langkah-langkah untuk pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu teknik analisa data kualitatif. Reduksi data untuk memfokuskan serta memilah data yang pokok dan penting yang berkaitan dengan strategi Partai Golkar dalam kemenangan pemilu di Kabupaten Tebo tahun 2017, sehingga dapat diambil kesimpulannya. Dengan demikian mempermudah peneliti karena reduksi memberikan gambaran yang jelas untuk mengumpulkan data dan mencari data selanjutnya. Selama dalam proses penelitian dilakukan reduksi data secara terus menerus.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Agusta, 2012). Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memahami berbagai hal yang dilakukan tim pemenang partai, semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai strategi Partai Golkar dalam pemenangan pemilukada di Kabupaten Tebo tahun 2017.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah sebagai hasil analisis untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan perbandingan, pengelompokkan, membuat pola dan trigulasi. Proses penarikan kesimpulan dengan melakukan intreprastasi data terkait startegi Partai Golkar dalam pemenangan pemilukada bupati dan wakil bupati tahun 2017 di Kabupaten Tebo yang telah di sajikan.